PENGHARMONISASIAN PEMBULATANDAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA DAN RANPERKADA OLEH KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM

Rosa Desi Natalisma Manurung¹, Janpatar Simamor²
rosadesinatalisma.manurung@student.uhn.ac.id¹, patarmora@yahoo.com²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi kewenangan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan Ranperda dan Ranperkada dengan norma hukum yang berlaku, termasuk nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebijakan nasional. Penelitian ini mengungkap peran strategis Kanwil Kemenkumham dalam menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa mengabaikan aspek kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, upaya Kanwil Kemenkumham dalam harmonisasi memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, sehingga mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Harmonisasi Ranperda, Ranperkada Oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

***Abstract:** This study analyzes the implementation of the authority of the Regional Office (Kanwil) of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) in the process of harmonizing the Draft Regional Regulation (Ranperda) and Draft Regional Head Regulation (Ranperkada) based on the principles of regional autonomy. This harmonization aims to ensure the alignment of the Draft Regional Regulation and Ranperkada with applicable legal norms, including the values of Pancasila and the 1945 Constitution, as well as national policies. This study reveals the strategic role of the Regional Office of Kemenkumham in aligning regional regulations with higher laws and regulations without ignoring aspects of regional independence. The results of the study show that, despite obstacles such as limited human and technical resources, the efforts of the Regional Office of Kemenkumham in harmonizing have made a significant contribution to the creation of quality regional legal products, thus supporting the implementation of good governance.*

***Keywords:** Harmonization Of Draft Regional Regulations, Draft Regional Regulations By The Ministry Of Law And Human Rights.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ditetapkan sebagai negara yang taat hukum didalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia telah dikukuhkan sebagai negara yang taat hukum. Sebagai negara hukum, negara harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari Sistem Hukum Nasional dalam menjalankan sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini harus dibuat dengan mempertimbangkan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologi serta asas-asas hukum yang sudah ada, karena ilmu perundang-undangan sangat penting untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam UUD 1945, ada dua cara di mana kekuasaan dibagi yaitu secara horizontal melalui lembaga negara dan kekuasaan tambahan mereka vertikal melalui politik desentralisasi, yang memberikan kepada daerah kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus negara dan kebijakan lokalnya sendiri. Menurut Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, negara dibagi menjadi daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki bentuk dan struktur pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan tugas pembantuan". Dalam hal ini, kepala daerah dan dewan legislatif, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memiliki wewenang untuk membuat kebijakan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, Pasal 65 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c menyatakan bahwa seorang Kepala Daerah memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Pasal 154 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota, bersama dengan Bupati/Wali Kota, memiliki wewenang untuk menetapkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, serta mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama dari DPRD.

Peraturan Perundang-undangan, menurut Bagir Manan, adalah hukum positif tertulis yang ditetapkan, dibuat, atau dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang mengandung tindakan yang berlaku secara umum dan menikat. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan dan menegaskan betapa pentingnya Prolegda dalam program pembentukan produk hukum daerah. Banyak peraturan daerah yang masih menjadi masalah. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan oleh aparat pengelola yang bekerja di lapangan langsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan setiap pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus kuat, dihormati, dan bersih. "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya" adalah salah satu dari sembilan agenda prioritas Nawa Cita. Peraturan daerah adalah bentuk hukum baru yang mencakup aturan tentang proses, bahkan kebiasaan, perilaku, dan sopan santun dalam melaksanakan tugas negara dan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Untuk membuat Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) digunakan, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3). Undang-Undang ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk pembentukan peraturan daerah. Dalam UU P3, peraturan yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah (gubernur). Selain itu, Pasal 14 UU P3 menyatakan bahwa

seluruh isi Perda mencakup undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. Jadi, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau Perda lainnya. Di tingkat daerah, diperlukan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah agar P3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat yang sama atau lebih tinggi. Dengan diundangkannya perubahan kedua UU P3, khususnya Pasal 58, fungsi Dewan Perwakilan Daerah digantikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kementeri. Fungsi sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 menyatakan:

1. Menteri, atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertanggung jawab atas koordinasi, pembulatan, dan pemantapan gagasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
2. Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertanggung jawab untuk memastikan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diharmonisasi, dibulatkan, dan diperkuat.

Dengan bergesernya pelimpahan wewenang kepada Kemenkumham untuk mengoordinir dan melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Kemenkumham perlu menyiapkan instrumen yang akan berfungsi sebagai koordinator dan pelaksana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 251 diubah, menyatakan bahwa Perda dan Perkada tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jumlah dan kualitas pembentukan Perda saat ini telah meningkat sebagai bagian dari semangat otonomi daerah. Peningkatan jumlah dan kualitas ini dianggap baik untuk kemajuan pemerintahan daerah. Karena Perda pada prinsipnya berada dalam kesatuan hukum nasional secara materil dan formil, pembentukan peraturan daerah oleh daerah otonom tetap harus dilakukan dalam kerangka sistem perundang-undangan nasional. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota berlomba-lomba untuk membuat Perda karena otonomi daerah. Namun, Perda seringkali menimbulkan banyak masalah hingga banyak Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan yang di atasnya.

Sebelum ditetapkan, rancangan Perda harus disesuaikan dengan mempertimbangkan dua (dua) aspek penting: konsepsi materi muatan Perda dan teknik penyusunan peraturan daerah. Aspek konsepsi materi muatan Perda adalah yang paling penting karena mencakup rancangan peraturan daerah dengan Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum. Aspek teknik penyusunan Perda mencakup kerangka peraturan perundang-undangan tingkat daerah, ragam bahasa, dan bentuk peraturan perundang-undangan daerah. Oleh karena itu, harmonisasi harus dilakukan secara bersamaan untuk mencapai keselarasan dan untuk mengurangi konflik dan efek kebijakan publik yang dimasukkan kedalam Perda tersebut agar diminimalisasikan dampak negatifnya kedepannya. Salah satu tugas utama yang paling terpenting oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM adalah pengharmonisasian Peraturan perundang-undangan di suatu daerah. Dan dalam menyelenggarakan tanggung jawab tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara terkhususnya pada bidang perancang, melakukan pembahasan Ranperda, evaluasi Perda, dan juga inventarisasi Perda yang berasal dari Pemerintah

Daerah. Dengan banyaknya Perda yang harus dibentuk dan diperbaharui dan juga di harmonisasikan di daerah Sumatera Utara, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara seharusnya membantu Pemda dalam proses pengharmonisasian Perda karena itu adalah tanggung jawab utama Kanwil Kemenkumham, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01- PR.07.10 Tahun 2005. Maksud Harmonisasi Perda disini adalah bagaimana proses perumusan/pembentukan perda, dan bagaimana penyajian kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sedangkan tujuan Harmonisasi Perda yang dilakukan adalah untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik/masyarakat daerah dengan kepentingan aparatur. Harmonisasi Perda merupakan bagian dari sistem pengawasan terhadap sebuah Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Dalam era otonomi daerah, peraturan daerah memegang peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun, sering kali ditemukan peraturan daerah yang tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memegang peran strategis dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada). Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan norma hukum, tetapi juga untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam kerangka otonomi daerah yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menyelaraskan peraturan daerah agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kebijakan nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewenangan Kanwil Kemenkumham dalam proses harmonisasi Ranperda dan Ranperkada, dengan fokus pada bagaimana proses ini mendukung prinsip-prinsip otonomi daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran strategis Kanwil Kemenkumham dan tantangan yang dihadapi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui produk hukum daerah yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yang dimana pendekatan dalam penelitian ini difokuskan yaitu untuk mengkaji mengenai seperti apa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang digunakan saat ini. Pada penelitian ini untuk mengkaji dan juga menganalisis terkait Pengharmonisasian, Pembulatan, dan juga Pemantapan dalam Konsepsi Ranperda dan Ranperkada yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham. Dan juga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini maka dilakukanlah penelitian yang bersifat ataupun pendekatan yuridis normatif, maka Teknik pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan pada penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*), dan peraturanperundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Ranperda dan Ranperkada Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Prinsip-Prinsip Otonomi Pemerintahan Daerah

Banyaknya perda yang dibatalkan memiliki konsekuensi yang signifikan. Salah satunya adalah ketidakpastian hukum karena perda tersebut sudah berlaku dan mengikat secara umum. Hal tersebut secara keseluruhan menciptakan beban terhadap pemerintah serta masyarakat. Namun, elemen kepastian hukum sangat penting di seluruh bidang

negara. Apabila pemerintah dari awal sampai akhir bertanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi proses pembentukan perda, perda tidak boleh dibatalkan setelah diundangkan terwujud. Salah satu penyebab kualitas perda yang buruk selama proses pembentukan perda adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang optimal pada tahap awal. Hal ini harus diperbaiki segera agar perda tidak dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota melalui proses peninjauan kembali atau klarifikasi, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan untuk meningkatkan pengawasan preventif terhadap proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa pertimbangan menunjukkan bahwa instrumen evaluasi eksekutif dan judicial review lebih penting daripada instrumen evaluasi eksekutif. Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan sangat penting dalam membantu pembuatan produk hukum regional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, Perancang Peraturan Perundang-undangan harus dilibatkan dalam setiap tahap proses pembentukan peraturan. Pejabat berwenang memberi pegawai negeri sipil ini tugas penuh untuk membuat peraturan dan instrumen hukum lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk mempersiapkan, mengolah, merumuskan rancangan hukum, mengharmonisasi, dan memastikan profesionalisme mereka sesuai dengan standar hukum dan disiplin ilmu terkait. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) memiliki peran strategis dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda dan Ranperkada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses ini melibatkan penyelarasan materi muatan peraturan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta kebijakan nasional. Kanwil Kemenkumham juga bekerja sama dengan DPRD dan pemerintah daerah untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham mencakup tahapan seperti permohonan harmonisasi, pemeriksaan administratif, analisis konsepsi, rapat harmonisasi, dan penyusunan berita acara harmonisasi. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dalam penyusunan regulasi dan pemahaman yang terbatas dari pemerintah daerah mengenai persyaratan administratif. Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara." Selain itu, berdasarkan Pasal 80 Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pengawasan di tingkat provinsi diberikan kepada lembaga vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sekarang dikenal sebagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di provinsi, menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berfungsi sebagai pembina hukum dan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan di daerah selaras dan selaras satu sama lain. Karena tugas dan fungsi Kantor Wilayah pada dasarnya merupakan implementasi logis dari tugas menteri di daerah, Kantor Wilayah harus serius mempersiapkan diri dan memiliki tenaga perancang hukum yang berkualitas. Dengan demikian, Kantor Wilayah harus memiliki tenaga perancang hukum yang berkualitas untuk melaksanakan tugas yang disebutkan di atas. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa Biro Hukum Pemerintahan Daerah bertanggung jawab untuk mengharmonisasi rancangan undang-undang yang berasal dari Kepala Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh kepala daerah juga memperoleh pengaruh otonomi. Karena harus diminta oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah untuk hadir dalam upaya tersebut, pemerintah pusat, yang diwakili oleh kementerian sebagai instansi vertikal di atas pemerintah daerah, memiliki peran pasif. Ini menunjukkan bahwa prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan telah diterapkan secara efektif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Beberapa ketentuan mengalami perubahan, termasuk ayat (2) dari Pasal 58 dan Pasal 63. Kedudukan Kementerian berubah untuk mencapai Harmonisasi Rancangan Perda. Pada awalnya, ini dilakukan atas permohonan Biro Hukum Pemerintah Daerah, tetapi sekarang dilakukan secara penuh oleh Kementerian yang mengelola urusan pemerintahan terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan mempertimbangkan implikasi yuridis dari perubahan pada Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terhadap implementasi otonomi daerah, serta upaya untuk harmonisasi rancangan perda yang berasal dari kepala daerah, ketentuan tersebut, dari sudut pandang implikasi yuridis dari perubahan tersebut pada Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kedudukan Pemerintah Pusat yang direpresentasikan melalui Kementerian justru semakin tegas dan cenderung menggeser asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Perlu diketahui bahwa sebenarnya, Pasal 18 UUD NRI 1945 menetapkan otonomi daerah di Indonesia karena kedaulatan rakyat yang menginginkan dan menuntut adanya badan pemerintahan di setiap daerah. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa masyarakat daerah tidak puas karena meskipun memiliki banyak sumber daya alam, mereka tidak memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan masyarakat pusat. Karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Harmonisasi Rancangan Perda telah ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah pusat. Selain itu, pembaharuan ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan sinkronisasi antara Perda dan undang-undang yang lebih tinggi untuk menghindari konflik vertikal antara undang-undang. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, lebih dari 3.000 Perda telah dibatalkan dan masih banyak Perda lainnya yang sedang diselidiki oleh hakim. Oleh karena itu, sinkronisasi sangat penting. Pasca Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, otoritas Kementerian sebagai representasi Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk mendorong pelaksanaan kontrol, evaluasi, peningkatan, dan perbaikan undang-undang, serta beberapa alasan lain, termasuk dasar hukum pembentukan Perda yang tidak tepat, materi muatan atau klausul yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang serta prinsip lain seperti mengandung prinsip diskriminasi dan melanggar hak asasi manusia. Dengan sinkronisasi ini, Perda, sebagai undang-undang pemerintah daerah, memberikan keamanan hukum yang dapat mempromosikan keadilan dan keuntungan bagi masyarakat daerah.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara berfungsi sebagai pembina hukum dan koordinator harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan di Provinsi Sumatera Utara. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bidang Hukum pada Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

bertanggung jawab untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Beberapa tahun terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara telah melaksanakan tugasnya untuk mengharmonisasi, membulat, dan memperkuat konsep beberapa rancangan peraturan daerah. Otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi di mana kepentingan rakyat dan aspirasi daerah dapat dipertimbangkan dengan adil. Untuk membuat daftar Raperda Provinsi, peraturan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi didasarkan pada rencana pembangunan, otonomi, dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari Gubernur atau Dewan Provinsi, dan harus disertai dengan penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademik. Untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, hanya beberapa perubahan akan mengubah beberapa materi, dan keterangan harus disertakan. Proses pembuatan rancangan perda provinsi dimulai dengan penciptaan penjelasan. Penjelasan ini harus mencakup konsep dan materi yang akan diatur dalam perda provinsi yang dibuat oleh pemrakarsa, jika ada. Rencana akademik untuk satuan kerja perangkat daerah provinsi dibuat oleh biro hukum pemerintah daerah provinsi. Pertemuan yang diatur dengan pemangku kepentingan menyelesaikan rencana. Gubernur memerintahkan pemrakarsa untuk membuat rancangan perda provinsi. Gubernur, sekda, pemrakarsa, biro hukum, satuan kerja perangkat daerah terkait, dan perancang peraturan perundang-undangan adalah anggota tim penyusun. Tim penyusun dapat mengundang peneliti atau ahli khusus yang dianggap dapat membantu dalam penyusunan rancangan perda provinsi jika diperlukan. Paraf diberikan oleh peraturan provinsi yang telah diselesaikan untuk mengatur tim penyusun dan pemrakarsa. Kepala biro hukum dapat meminta lembaga tingkat atas dari kementerian bidang hukum untuk memfasilitasi koordinasi, pembulatan, dan pemantapan ide. Peraturan harus ditandatangani dengan paraf persetujuan dari pemrakarsa dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi. Sekda kemudian menyerahkannya kepada gubernur. Menurut Pasal 67 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakilnya harus menjalin hubungan kerja dengan semua perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah. Untuk memaksimalkan hasil dan daya guna, hubungan ini dibangun antara Instansi Vertikal dan Dinas Daerah untuk memastikan bahwa tugas dan kegiatan semua Instansi Vertikal selaras, serasi, dan terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengembangan budaya hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum adalah tanggung jawab Kantor Wilayah. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota harus melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat membuat produk hukum daerah, terutama peraturan daerah. Di Sumatera Utara, ini telah dicapai melalui Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh provinsi.

Dalam hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, sesuai dengan daftar Administratifnya melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah administrative Sumatera Utara. Wilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wialayah provinsi di Indonesia yang terletak dibagian utara Pulau Sumatera. Luas total wilayah Pronvisi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km², atau sekitar 3,83% dari luas pulau Sumatera. Secara administrative, Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 Kabupaten dan 8 Kota. Administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota ini terdiri dari atas 325 kecamatan dan 5.456 desa/kelurahan.

2. Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Dasar RI 1945.

Pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada bertujuan untuk menyelaraskan rancangan peraturan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini memastikan bahwa peraturan daerah tidak bertentangan dengan norma hukum nasional dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pengharmonisasian ini tetap menghormati prinsip desentralisasi, meskipun ada kontrol dari pemerintah pusat melalui Menteri Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan untuk mencegah disharmoni hukum dan memastikan bahwa peraturan daerah mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham dilakukan dengan menyelaraskan materi muatan peraturan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, baik secara vertikal maupun horizontal. Meskipun ada kontrol dari pemerintah pusat, prinsip otonomi daerah tetap dihormati, dan harmonisasi ini justru menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah daerah diberi otoritas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Dengan memberikan otonomi luas kepada daerah, diharapkan mereka dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi luas juga diharapkan memungkinkan daerah untuk meningkatkan daya saing dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan masing-masing daerah dalam sistem NKRI. Penataan Peraturan Perundang-Undangan akan memungkinkan lembaga negara untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan sebagai cara untuk menguatkan sistem hukum Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pembentukan hukum sehingga dapat menguntungkan masyarakat. Banyak Undang-Undang yang dibatalkan karena bertentangan dengan Konstitusi atau Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan Peraturan di atas menambah masalah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dibutuhkan mekanisme baru yang memungkinkan lembaga negara tertentu untuk melakukannya.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara, pembentukan Undang-Undang dan Perda ini diharapkan akan meningkatkan keadaan. Tujuan menciptakan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat diharapkan dapat dicapai. Sudah jelas bahwa berbagai masalah yang disebutkan di atas tidak dapat diselesaikan secara langsung. Proses panjang dan komitmen yang kuat dari lembaga pembentuk hukum diperlukan. Peraturan Perundang-Undangan harus menggabungkan seluruh undang-undang yang ada. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan manusia secara damai. Untuk mencapai tujuan negara ini, diperlukan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis. Untuk mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan ini, peraturan perundang-undangan suatu negara harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan negara lain, proses yang disebut harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi Raperda, yang didefinisikan sebagai keselarasan, kecocokan, dan keserasian, adalah salah satu tahapan penting dalam persiapan pembentukan Perda. Dalam konteks pengharmonisasi undang-undang, suatu undang-undang harus selaras, cocok, dan selaras dengan undang-undang lainnya. Sebelum kita membahas tentang harmonisasi raperda, kita akan berbicara tentang jenis harmonisasi undang-undangan. Harmonisasi vertikal dan horizontal adalah dua jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horizontal mengacu pada harmonisasi antara peraturan yang disusun dalam struktur hierarki yang sama atau sebanding. Di sisi lain, harmonisasi vertikal mengacu pada kewajiban pembuat undang-undang untuk menyusun undang-undang secara selaras dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang lebih tinggi, yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Asas *lex posteriori derogate legi priori* sangat terkait dengan harmonisasi vertikal. Beberapa alasan mengapa Raperda harus diharmonisasi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pertama, pemerintah akan

memiliki kemampuan untuk menguji Perda melalui pemeriksaan eksekutif daripada proses pemeriksaan hukum Mahkamah Agung. Kedua, akan ada keamanan hukum untuk proses pembentukan Perda. Ketiga, sesuai dengan prinsip negara kesatuan, peraturan hukum disusun dalam hierarki yang saling tergantung dan terkait satu sama lain. Keempat, pemerintah daerah tidak kehilangan uang atau moral.

Tahapan pengharmonisasian Raperda termasuk dalam tahapan pembentukan Perda. Namun, Kementerian Hukum dan HAM, yang bertanggung jawab untuk membangun peraturan menilik Raperda yang diusulkan oleh DPRD, melakukan pengharmonisasian Raperda sebelum diproses oleh Balegda. Pengharmonisasi Raperda berkonsentrasi pada tahap penyusunan dan diskusi. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, rancangan undang-undang dapat dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Dalam kasus di mana DPRD melakukannya, rancangan undang-undang dapat dibuat oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang undang-undang tertentu, seperti yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Ini adalah hak anggota Dewan untuk melakukan inisiatif rancangan undang-undang. Sementara itu, Raperda, yang diinisiasikan oleh Kepala Daerah, dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah, biro hukum, atau bagian hukum, melalui berbagai proses. Kesatu, draf Perda tentang barang yang akan diatur disusun oleh pimpinan unit kerja atau tim antarunit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Konsep Raperda disertakan dengan pokok-pokok pikiran, termasuk maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum, materi yang akan diatur, dan keterikatannya dengan berbagai undang-undang. Selanjutnya, konsep Raperda dari unit kerja diserahkan kepada Sekretariat Daerah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa biro atau bagian hukum melakukan harmonisasi materi muatan Raperda. Ketiga, konsep Raperda yang diajukan akan diminta untuk disempurnakan oleh biro hukum atau bagian hukum bersama dengan pimpinan unit kerja lainnya. Keempat, penyempurnaan dan Sementara itu, Raperda, yang diinisiasikan oleh Kepala Daerah, dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah, biro hukum, atau bagian hukum, melalui berbagai proses. Kesatu, draf Perda tentang barang yang akan diatur disusun oleh pimpinan unit kerja atau tim antarunit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Konsep Raperda disertakan dengan pokok-pokok pikiran, termasuk maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum, materi yang akan diatur, dan keterikatannya dengan berbagai undang-undang. Selanjutnya, konsep Raperda dari unit kerja diserahkan kepada Sekretariat Daerah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa biro atau bagian hukum melakukan harmonisasi materi muatan Raperda. Ketiga, konsep Raperda yang diajukan akan diminta untuk disempurnakan oleh biro hukum atau bagian hukum bersama dengan pimpinan unit kerja lainnya. Keempat, penyempurnaan dan finalisasi dilakukan oleh biro hukum atau bagian hukum sebelum diserahkan ke Kepala Daerah untuk diperiksa. Setelah Kepala Daerah menyetujuinya, konsep akhir berubah menjadi Raperda. Kelima, Raperda disampaikan kepada Ketua DPRD bersama dengan pengantar untuk persetujuan.

Proses pembentukan Perda yang berbeda digariskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diperbarui oleh UU Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan baru dalam Pasal 97D, yang berlaku untuk Kabupaten/Kota dan bentuk rancangan peraturan kepala daerah, juga berlaku untuk Provinsi. Dengan perubahan ini, proses harmonisasi Perda menjadi lebih sentralistik dan diawasi oleh pemerintah pusat. Ketentuan dalam rancangan perubahan kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 meningkatkan sentralisasi ini. Selain mempertimbangkan persandingan dalam Pasal 58, perhatikan perubahan dalam Pasal 97D UU 13/2022, yang berbunyi sebagai berikut: "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bertanggung jawab

untuk mengharmonisasi gagasan Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur. Seperti yang disebutkan sebelumnya, koordinasi, pembulatan, dan pemantapan dilakukan oleh biro hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sementara itu, peraturan pengharmonisasian saat ini dilakukan oleh lembaga atau kementerian yang tidak berafiliasi dengan pemerintah daerah. Ini adalah tanggapan yang tepat untuk memulai perbaikan sehingga setiap peraturan yang dibuat dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Konsep disesuaikan dengan Rancangan Perda dan Rancangan Perda yang dihasilkan dari Rapat Panitia Antar perangkat Daerah, yang disepakati oleh anggota Panitia melalui parafnya. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham bertanggung jawab atas pengharmonisasian tersebut. Dengan asumsi bahwa pemerintah atasan memiliki otoritas untuk mengontrol pemerintahan bawahan, perspektif negara kesatuan tampaknya masuk akal. Dengan kata lain, berdasarkan UUD NRI.

Pemerintah pusat mengawasi pembuatan undang-undang dengan mengubah atau mencabut undang-undang sebelum diganti dengan undang-undang baru. Ini dilakukan sebagai kelanjutan dari Putusan MK Nomor 56/PUUXIV/2016. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat konsisten dengan produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dan untuk memastikan bahwa produk hukum tersebut tetap teratur dan jelas, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perubahan sosial ekonomi. Untuk menjamin pelaksanaan harmonisasi Perda antara inisiatif kepala daerah dan rekomendasi DPRD, tidak hanya kesesuaian substansi dengan materi muatan akan dievaluasi, tetapi juga sinkronisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Perda provinsi dan kabupaten/kota akan lebih tertata dari hulu sampai hilir jika perda sentral diharmonisasi. Salah satu hasil dari harmonisasi sentralistik adalah bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat diharapkan dapat diterjemahkan selaras dengan Perda yang akan dibuat. Efek lain dari harmonisasi sentralistik adalah bahwa masalah yang pernah dihadapi pemerintah sebelumnya dalam pembentukan Perda semakin tertanggulangi, terutama karena jumlah koordinator yang terlibat dalam proses pembentukan Perda yang ideal. Namun, UU Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DPRD provinsi, dengan persetujuan gubernur, dan DPRD kabupaten, dengan persetujuan bupati, dapat membuat Perda. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, suatu peraturan daerah idealnya melibatkan partisipasi masyarakat daerah dengan prinsip keterbukaan dan materi peraturannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak saling tumpang tindih. Sementara daerah berfungsi sebagai pelaksana NSPK, instrumen norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) digunakan sebagai acuan dalam pengawasan Perda. Gubernur, yang bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, melakukan pengawasan langsung atas NSPK. Dengan demikian, daerah secara bertahap kembali ke keadaan pusat atau sentripetal. Sektor utama pembentukan undang-undang kini tersentralisasi pada lembaga yang memiliki otoritas pemerintah dalam bidang ini. Oleh karena itu, pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan penataan sekaligus membentuk peraturan yang di dalamnya termasuk Perda akan lebih mengoptimalkan harmonisasi Perda menuju ke arah sentralistik. Menurut Bayu Dwi Anggono, pembentukan badan khusus di sektor legislasi akan mencakup tanggung jawab harmonisasi termasuk Perda melalui pengukuran kesesuaian substansi dengan materi muatan serta sinkronisasi dengan peraturan lainnya.

Berbagai instrumen peraturan telah mendukung kebijakan penataan dalam pembuatan Perda, tetapi pemerintah daerah masih membuat beberapa Perda yang bermasalah. Selain itu, konsep perubahan kedua UU PPP tidak memperhatikan masalah harmonisasi karena fokus pembentuk undang-undang hanya pada melegalkan teknik omnibus law untuk menyelesaikan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Seluruh undang-undang yang mengatur pembentukan Perda harus digabungkan. Untuk memenuhi kebutuhan daerah, pemerintah pusat juga harus menghadapi kesulitan merekonstruksi kembali kebijakan strategis nasional dalam RPJPD dan RPJMD. Untuk mencapai Perda

yang efektif, juga perlu mempertimbangkan otoritas penyusun peraturan perundang-undangan sebagai domain pemerintah pusat dan peraturan yang diterapkan di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengubah mekanisme Harmonisasi Rancangan Perda yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah dan sekarang diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, memberikan kontrol atas norma. Sebelumnya, kontrol atas norma, khususnya Rancangan Perda, dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintahan. Karena pemerintahan daerah berdiri di atas asas otonomi daerah, bukan negara bagian dengan kemerdekaan yang luas, perubahan cara kontrol atas peraturan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan posisi pemerintahan daerah. Dengan demikian, pengawasan penyelenggaraan Rancangan Perda melalui Harmonisasi oleh Pemerintah Pusat, yang ditugaskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada dasarnya mengubah dasar desentralisasi dan dekonsentrasi otonomi daerah. Namun, ini tidak menghilangkan otonomi daerah secara keseluruhan, dan malah memberikan keamanan hukum kepada masyarakat. Pengharmonisasian rancangan perundang-undangan pada dasarnya berarti menyesuaikan materi peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, serta kebijakan yang terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini menghasilkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara menghadapi sejumlah kesulitan dalam membantu menyusun peraturan daerah dan undang-undang daerah lainnya. Salah satunya adalah kurangnya kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara untuk mengatasi hambatan termasuk mendorong pembentukan payung hukum yang kuat sebagai peraturan pelaksana tentang pelibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dan meningkatkan kerja sama dengan instansi horizontal di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Mulyani. (2020). Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Juridica*, Vol 2, No.1.
- BN, Hermi Sari, Galang Asmara, dan Zunnuraeni Zunnuraeni. (2020). Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.22 No. 2.
- Dewi, Ida Ayu Dyah Permata, Ida Ayu Putu Widiati, Ketut Sukadana. (2020). "Peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" *Jurnal Analogi Hukum*, Voi. 2, No.1.
- Halawa, Willem Cahyadi, Haposan Siallagan. (2025). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Dearah Provinsi Sumatra Utara, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 15.
- Huzeani, Mohamad Roky & Nuril Firdausiah. (2022). Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia, *Rechtenstudent*, Vol.3, No. 1.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bay umedia Publishing.
- I. Ridwan & I.R. Sumirat. (2021). *Book Series Demokrasi Dan Otonomi Daerah Volume 1:*

- Dinasti Politik Dan Demokrasi Lokal (Vol.1). Syiah University Press.
- Joisen, Hely, dkk. (2022). Strategi Bapemperda dalam penyusunan PERDA Hak Inisiatif DPRD No 7 Tahun 2017 tentang insentif tenaga pendidik pada tenaga pendidikan non-formal di bidang keagamaan (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014-2019). *Jurnal Regional Planning*, Vol.4, No.2.
- Karyadin, Azizah. (2023). Peranan Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). *Jurnal Yustitiabelen*.
- Lestari, Ade, Lince Magriasti, & Hari Suriadi. (2024). Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, Vol.3, No.1.
- M. N. A. W. Alqarni. (2021). *Book Series Demokrasi Dan Otonomi Daerah Volume 1: Dinasti Politik Dan Demokrasi Lokal (Vol. 1)*. Syiah Kuala University Press.
- Muzayyin, Ahmad, dkk. (2023). Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Indonesia Berdaya.
- Nurhaslita Sari, dkk. (2021). Peran DPRK Aceh Utara Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran. *Jurnal Public Policy*, Vol. 7, No.2.
- Pangaeman, Michael A. (2016). Urgensi Program Pembentukan Perda (Propmperda) Sebagai Instrumen Perencanaan dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum*, Vol. 04.
- Prabowo, Raffel Pradityo, Sunny Ummu Firdaus. (2024). Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Kewenangan Executive Preview Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, RES PUBLICA. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 8, No.3.
- Pratiwi, Indah, Yuliandri, Dian Bhakti Setiawan. (2024). Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4.
- Rahim, Abdur, dkk. (2023). Problematika Sistem Otonomi Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, Vol.4, No.3.
- Simanjuntak, Reynold. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.7, No.1.
- Simatupang, Taufik H. (2017). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 1.
- Sudarsono, M. Riban Satia, & M. Yusuf. (2022). Implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah (Kajian di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah). *Pencerah Publik*, Vol.9, No.2.
- Soetarto, Elisabeth Sitepu. (2020). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penetapan Peraturan Daerah APBD di Kantor DPRD Sumut. *Jurnal Governance Opinion*, Vol.5, No.1.
- Sopiani dan Zainal Mubaraq. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17, No.2.
- S, Muhlisin & S. (2021). Eksistensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam upaya meningkatkan kinerja dan mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Demak. *Jurnal Suara Keadilan*, Vol.22, No.2.
- Thomas Dachi, Thomas. (2022). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Prointrgritas*, Vol.6, No.3.
- Tulenan, Santa Pricilia Gabriel, dkk. Kewenangan Eksekutif dalam Melakukan Pratinjau Rancangan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2025 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, *Lex Administratum*, Vol. IX, No.6.
- Umam, Abd, dkk. (2024). Landasan Hukum dan Ketidakadilan Dalam Otonomi Indonesia. *Indonesian Journal Of Innovation Studies*, Vol.25, No.2. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i2.1070>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.